

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA UNTUK AFGHANISTAN PASCA-KEJATUHAN KABUL TAHUN 2021 DARI PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME

Musa Derek Sairwona

Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Magister Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

e-mail: sairwona@gmail.com

ABSTRAK

Kejatuhan Kabul pada 2021 dan berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan menciptakan dilema untuk kebijakan luar negeri banyak negara termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, hubungan diplomatik dengan Afghanistan yang telah terjalin sejak kemerdekaan patut dijaga. Di sisi lain, cara perebutan kekuasaan yang dilakukan Taliban dan sejumlah nilai utama yang diusung Taliban berlawanan dengan nilai dan norma internasional sehingga pengakuan terhadap pemerintah Taliban sulit dilakukan. Dalam menghadapi dilema ini, Indonesia tetap melakukan hubungan dengan Afghanistan walaupun belum mengakui pemerintahan Taliban. Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Afghanistan berbentuk bantuan pendidikan untuk warga negara Afghanistan khususnya akses pendidikan tinggi untuk perempuan. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, penelitian ini menemukan bahwa identitas, nilai dan norma yang dijunjung tinggi Indonesia sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia ikut mengasah kebijakan luar negeri yang ditempuhnya. Selain itu, faktor kepemimpinan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri perempuan pertama yang sangat menjunjung tinggi pentingnya pendidikan untuk perempuan serta solidaritas Islam global menjadi faktor yang memengaruhi pilihan kebijakan luar negeri Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Afghanistan, Kejatuhan Kabul, Taliban, Konstruktivisme

ABSTRACT

The fall of Kabul in 2021 and the return of Taliban to leadership created dilemma for various countries' foreign policy, including Indonesia. For Indonesia, diplomatic relations with Afghanistan which has been built since their independence must be maintained. On the other side, the way Taliban take over the leadership and various main values of Taliban are contradictory with international values and norms, which makes it difficult to acknowledge the government of Taliban. In facing this dilemma, Indonesia keeps the relationship with Afghanistan even though Indonesia has not acknowledged the government of Taliban. Indonesian foreign policy towards Afghanistan can be seen in the form of educational assistance for the people of Afghanistan, especially higher education access for woman. Using the Constructivism perspective, this research finds out that identity, values, and norms acknowledged by Indonesia as a democratic country with the most Muslim population in the world are sharpening its foreign policy. In addition, the leadership of Indonesia Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi as the first woman to be the Minister of Foreign Affairs becomes one of the most important factors that affects the choices of Indonesian foreign policy. Retno Marsudi is well known for her priority of the importance of education for woman and the value of global Islamic solidarity.

Keywords: Indonesian Foreign Policy, Afghanistan, The Fall of Kabul, Taliban, Constructivism

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada 15 Agustus 2021, Taliban kembali menguasai Afghanistan setelah berhasil meruntuhkan pemerintahan Afghanistan yang dipimpin oleh Presiden Ashraf Ghani. Setelah menguasai kembali negara itu, Taliban menghadapi kesulitan

untuk mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional yang masih enggan memberikan pengakuan resmi kepada Taliban sebagai pemerintah yang sah di Afghanistan. Meskipun sampai dengan bulan Maret 2023, 14 negara telah mengizinkan Taliban mengelola misi diplomatik Afghanistan di wilayah mereka,

pengakuan resmi tetap sulit dicapai (Associated Press, 2023). Indonesia, seperti negara-negara lainnya, menghadapi dilema dalam mengelola hubungan luar negeri dengan Afghanistan. Di satu sisi, Indonesia ingin melanjutkan hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan Afghanistan yang telah dibangun sejak kemerdekaan Indonesia. Di sisi yang lain, Indonesia belum siap memberikan pengakuan yang resmi kepada Taliban sebagai pemerintah yang sah di Afghanistan karena hakekat perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Taliban bertentangan dengan norma dan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat internasional seperti nilai demokrasi dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia.

China menjadi negara pertama yang mengirimkan Duta Besar ke Kabul pada September 2023 dan menerima Surat Kepercayaan Duta Besar Afghanistan di Beijing pada Desember 2023 (Gul, 2023). Namun demikian China tetap belum memberikan pengakuan resmi kepada Taliban sebagai penguasa yang sah dari Afghanistan. Selain itu, isu terkait perwakilan Afghanistan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga sampai dengan Agustus 2023 masih belum terselesaikan (United Nations, 2023). Pejabat Perwakilan yang ditugaskan oleh Taliban tidak berhasil meyakinkan PBB untuk mengakui calon yang mereka tunjuk sebagai wakil negara Afghanistan di PBB. Situasi ini mencerminkan kesulitan yang dihadapi Taliban dalam membangun pengakuan global dan memastikan legitimasinya di mata masyarakat internasional.

Keengganan berbagai negara dalam memberikan pengakuan terhadap pemerintahan Taliban dapat dijelaskan dari hakekat perebutan kekuasaan yang terjadi. Pertama, cara Taliban merebut kekuasaan dengan menggunakan kekuatan militer dari pemerintahan Afghanistan sebelumnya, telah menimbulkan keraguan tentang keabsahan kekuasaan mereka. Kurangnya penyelesaian melalui perundingan dan kurang inklusifnya proses pembentukan

pemerintahan semakin memperburuk ketidakpastian ini. Kedua, tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan Taliban, terutama terhadap perempuan dan kelompok minoritas, beserta keterlibatan mereka dengan organisasi teroris internasional, menyebabkan negara-negara lain berhati-hati dalam memberikan pengakuan tanpa ada bukti nyata perubahan yang sungguh-sungguh dalam perilaku dan pendekatan pemerintahan Taliban.

Meskipun Taliban sulit mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional, namun fakta menunjukkan bahwa Taliban mampu untuk menguasai kembali Afghanistan dalam waktu yang singkat pasca mundurnya pasukan Amerika Serikat dan NATO, menunjukkan adanya dukungan domestik Afghanistan yang cukup kuat terhadap Taliban. Di satu sisi, penguasaan Taliban secara de facto di Afghanistan bagaimanapun juga merupakan suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh dunia internasional. Di sisi lain, kondisi politik dalam negeri Afghanistan saat ini cukup mengkhawatirkan dengan diterapkannya kebijakan yang represif dan tidak demokratis atas dasar agama. Taliban dalam hal ini menggunakan agama sebagai dasar legitimasi kebijakan politik yang sangat tersentralisasi dengan kontrol yang sangat kuat. Sistem pemerintahan Islam Emirat yang dipilih Taliban menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan seorang emir dari kelompok elit Taliban, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini berpotensi memperkuat cengkeraman kekuasaan Taliban untuk waktu yang lama di Afghanistan.

Kondisi ekonomi dalam negeri Afghanistan serta bagaimana cara Taliban memerintah akan sangat mempengaruhi prospek kelangsungan kekuasaan Taliban di Afghanistan. Keberhasilan pembangunan ekonomi di bawah pemerintahan Taliban, misalnya, akan sangat mempengaruhi tingkat dukungan masyarakat. Jika Taliban dapat mengatasi

tantangan-tantangan ekonomi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Afghanistan, maka prospek pemerintahannya akan lebih baik. Namun, jika Taliban tidak bisa mengatasi tantangan tersebut, maka pemerintahannya tidak akan bertahan lama. Selain itu kebijakan Taliban yang membatasi HAM, terutama hak-hak perempuan telah menimbulkan kecaman dunia internasional terhadap Taliban. Namun demikian, Taliban telah menunjukkan komitmen untuk menerapkan hukum Islam yang ketat di Afghanistan. Hal ini membuat pembatasan hak asasi manusia dikhawatirkan juga akan bertahan lama dan dunia internasional akan terus dihadapkan pada dilema menjalankan hubungan dengan Afghanistan.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, pertanyaan utama yang jawabannya dibahas dalam artikel ini yaitu: bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021? Dengan perspektif konstruktivisme, penelitian ini menekankan pada dua faktor utama yang mengasah kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu persepsi identitas Indonesia sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan nilai serta norma yang dimiliki Menlu Indonesia Retno Marsudi, yang merupakan menteri luar negeri Indonesia perempuan yang pertama. Beliau yakin dengan pentingnya pendidikan untuk perempuan dan perjuangan kesetaraan gender sebagai agenda global. Identitas, nilai dan norma ini ikut membentuk kebijakan yang diambil Indonesia untuk Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban.

2. Tinjauan Pustaka

Pengambilan sikap terhadap pemerintah Taliban ditentukan bukan hanya oleh kepentingan sebuah negara tetapi juga kajian terhadap karakteristik Kepentingan negara-negara dalam

mengambil sikap. Viola Fee Dreikhausen dan Florence Gaub dalam tulisan *policy brief* yang berjudul *Taliban In or Out?: Afghanistan in 2025* (Gaub, 2022) mengidentifikasi beberapa kondisi perubahan utama di Afghanistan pasca mundurnya pasukan Amerika Serikat dan NATO pada Agustus 2021. Dengan melakukan analisa dokumen penelitian sebelumnya dan laporan pemerintah serta wawancara dengan sejumlah pakar, peneliti menyimpulkan bahwa Afghanistan masih akan tetap membutuhkan bantuan internasional untuk beberapa tahun ke depan serta kondisi vakum pengaruh internasional yang terutama ditinggalkan Amerika Serikat akan digantikan oleh Pakistan, China dan Rusia.

Selain itu, peneliti juga menjelaskan bahwa dalam upaya konsolidasi kekuasaan di Afghanistan, Taliban menghadapi sejumlah tantangan domestik yang sulit, termasuk krisis ekonomi lokal, krisis kemanusiaan, dan masih adanya tantangan dari kekuatan politik oposisi serta pertentangan internal dalam Taliban. Namun demikian peneliti berkesimpulan bahwa Taliban akan dapat melakukan konsolidasi kekuatan dan akan tetap berkuasa di Taliban pada tahun 2025.

Shadi Hamid dalam artikel yang berjudul *"Americans never understood Afghanistan like the Taliban did"* (Hamid, 2021) menjelaskan kegagalan Amerika Serikat memahami bagaimana Taliban yang digambarkan sebagai kekuatan yang kejam dan jahat dapat memperoleh legitimasi dan dukungan publik Afghanistan. Penulis menemukan bahwa meskipun Taliban sering bertindak kejam, namun di sisi lain juga menjadi alternatif pemerintahan lokal yang lebih baik dari pemerintahan Afghanistan yang dikenal koruptif dan didukung Amerika Serikat.

Selain itu, peneliti juga menemukan adanya penilaian pembuat kebijakan Amerika Serikat bahwa sejumlah budaya dan tradisi Afghanistan termasuk terkait hukum Syariah Islam merupakan

penghalang sejumlah upaya perbaikan dan pembangunan Afghanistan. Hal ini menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal yang melihat kebijakan yang diambil pemerintah Afghanistan dukungan Amerika Serikat tidak mempertimbangkan “*best interest*” masyarakat. Taliban yang kemudian hadir memberikan alternatif kebijakan termasuk sistem peradilan Islam yang cenderung lebih efisien, mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat.

Literatur selanjutnya berjudul “*The Paradox of the Heavy-Handed Insurgent: Public Support for the Taliban Among Afghan Pashtuns*” (Kaltenthaler, 2022). Dengan menggunakan data pendapat publik dari Survey of the Afghan People tahun 2018, Karl Kaltenthaler, Arie W. Kruglanski dan Austin J. Knuppe (2021) menemukan bahwa serangan militer yang dilakukan Taliban di wilayah yang dikendalikan pemerintah telah menimbulkan rasa tidak aman dan tidak percaya kepada kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan publik dan perlindungan keamanan. Taliban melalui pendekatan “*heavy-handed insurgent*” berhasil memposisikan diri dalam pandangan publik sebagai kekuatan riil yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk menyediakan keamanan dan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pedesaan.

Dalam tulisan tersebut juga disebutkan bahwa meskipun dalam periode 2001 – 2021, jumlah korban warga sipil Afghanistan mencapai lebih dari 100.000, hasil survey sebagai dasar kajian menunjukkan dukungan yang konsisten terhadap Taliban terutama dari etnik Pashtun yang merupakan etnik dengan jumlah terbesar di Afghanistan. Peneliti berkesimpulan bahwa “*heavy-handed insurgent*” yang dilakukan Taliban juga berhasil karena memiliki kesamaan identitas sosial dengan etnik mayoritas Pashtun yang mengokohkan kepercayaan sosial antara keduanya.

Implikasi dari temuan tersebut adalah dukungan yang konsisten dan kuat dari publik khususnya dari kelompok sosial yang memiliki kesamaan identitas, menjadi landasan kuat bagi konsolidasi kekuasaan Taliban di Afghanistan. Taliban dalam hal ini memiliki kepercayaan diri untuk paling tidak dalam jangka pendek dan menengah melaksanakan kebijakan pemerintahan yang terkesan “*heavy handed*” dan tetap mendapatkan dukungan publik.

Dukungan dari etnis mayoritas Pashtun juga didapat dari ideologi Taliban yang dikombinasikan dari Syariah dan Pashthunwali pra-Islam sebagaimana ditulis dalam penelitian “Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya Terhadap Geopolitik Global” oleh Boy Anugerah dan Jabinson Purba yang dimuat dalam Jurnal Lemhanas RI (Purba, 2021).

Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa Pashthunwali merupakan kode etik tidak tertulis dan cara hidup tradisional yang sangat dipegang etnis Pashtun dan menjadi salah satu faktor kuatnya dukungan etnik Pashtun terhadap Taliban. Pashtunwali mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk kehormatan, keberanian, keramahan, dan pembalasan dendam. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam budaya Pashtun dan menjadi bagian integral dari identitas mereka.

Terkait dengan penelitian ini, berdasarkan temuan dan argumen dari beberapa pustaka dalam klasifikasi ini dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan dan cara menjalankan pemerintah yang dilaksanakan Taliban tidak selalu sejalan dengan norma-norma yang dapat diterima secara universal, seperti penghormatan hak asasi manusia khususnya wanita, Taliban tetap mendapatkan dukungan publik Afghanistan. Dukungan publik terhadap Taliban dimaksud, menjadikan fakta Taliban sebagai perwakilan tunggal Afghanistan dalam pergaulan internasional tidak dapat dipungkiri.

Posisi Taliban secara *de facto* sebagai penguasa tunggal di Afghanistan yang membentuk masa depan Afghanistan, menimbulkan kekhawatiran besar di dunia internasional khususnya terkait hak asasi manusia dan situasi keamanan dan stabilitas di kawasan. Meskipun Taliban secara resmi mengklaim telah memoderasi sikapnya, namun berbagai kebijakan yang dijalankan pasca kembali berkuasa Agustus 2021 menunjukkan fakta sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, memahami asal usul dan ideologi Taliban yang sangat terkait dengan tradisi serta kepercayaan agama sangat penting bagi komunitas internasional untuk menghadapi tantangan kompleks dalam berhubungan dengan Taliban.

Dalam buku "*The Rise of Islamic Fundamentalism*" (Rabie, 2021), Mohamed Rabie menuliskan bahwa bahwa bangkitnya fundamentalisme Islam pada awalnya merupakan sebuah pergerakan sosial keagamaan untuk menolak degradasi moral serta mengajak umat Muslim kembali ke ajaran tradisional Islam. Namun dalam perkembangannya menjadi gerakan sosial politik untuk mengganti suatu sistem pemerintahan dengan "sistem Islami" yang sesuai dengan standar ajaran dalam Islam tradisional. Slogan utama yang sering digunakan adalah "Islam is the Solution".

Kelompok fundamentalis Islam dengan dasar kepercayaan memiliki kebenaran mutlak dari Tuhan, disimpulkan cenderung tidak memiliki pandangan dan visi yang jelas tentang masa kini dan masa depan karena terpaku pada model masa lalu. Pemimpin gerakan fundamentalis hanya memanfaatkan ketakutan masyarakat umum khususnya generasi muda yang sedang berada dalam kondisi yang sulit untuk mencapai tujuan politiknya.

Penulis selanjutnya menjelaskan bahwa upaya untuk mengatasi gerakan Islam fundamentalis hanya dapat dilakukan dari dalam masyarakat Muslim itu sendiri dan tidak dapat diatasi oleh kelompok

sekuler barat. Dalam hal perlu diciptakan suatu kondisi dalam masyarakat Muslim yang moderat dan nasionalis, yang dalam penilaian penulis antara lain justru dalam sejarahnya merupakan kelompok di dunia Arab yang ditekan dan dianggap sebagai ancaman bagi kekuatan kolonial serta keluarga kerajaan Arab yang memerintah. Kelompok moderat ini juga perlu mendapatkan dukungan dari dunia internasional dalam memperjuangkan berbagai persoalan konflik di dunia Muslim termasuk di Palestina, Irak dan Suriah.

Choirur Rois dan Nur Robaniyah, peneliti dari UIN Sunan Ampel dalam tulisan "Praktik Politik Islam: Kepemimpinan Taliban Di Afghanistan dalam Tinjauan Politik Islam Kawasan" (Robaniyah, 2023), berusaha menjawab sejumlah pertanyaan yang muncul dari persepsi negatif terhadap Islam radikal, aktivitas terorisme, dan Islamofobia, yang merupakan hasil langsung dari praktik politik di Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban. Peneliti dengan menggunakan pendekatan historiografi dan metode deskriptif kualitatif, menyimpulkan bahwa menyimpulkan bahwa tindakan politik Taliban di Afghanistan mencerminkan ambisi kelompok fundamentalis dengan tujuan untuk mendominasi negara dengan dalih penerapan hukum Syariah Islam.

Peneliti berpandangan bahwa tindakan-tindakan Taliban yang membenarkan kekerasan dan tindakan represi terhadap kelompok minoritas dan perempuan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Peneliti juga melihat bahwa campur tangan barat selama ini tidak efektif dan bahkan semakin memperburuk situasi di Afghanistan serta merusak citra Islam di dunia internasional.

Sistem pemerintahan yang digunakan Taliban pasca kembali pada 2021 masih sama dengan pertama kali berkuasa pada 1996–2001 yaitu memakai prinsip syariah dengan Mullah sebagai pemimpin tertinggi. Salah satu hal pertama yang dilakukan Taliban pada 2021 adalah

membubarkan Komisi Pemilu. Boy Anugrah dan Jabinson Purba dalam tulisannya terkait kondisi politik dan keamanan Afghanistan, menjelaskan bahwa Taliban berpandangan pemilu dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak pernah mengadakan pemilu sejak berkuasa tahun 1996. Penerapan hukum pemerintahan Taliban tidak melalui proses legislasi, namun hanya melalui dekrit atau keputusan langsung Mullah (Purba, 2021). Dengan demikian, pertimbangan dalam suatu kebijakan termasuk kebijakan luar negeri akan lebih sempit berdasarkan pemahaman dan interpretasi dan kelompok kecil elit Taliban, tanpa adanya kebutuhan mempertimbangkan masukan dari publik.

Terkait dengan penelitian ini, berdasarkan temuan dan argumen dari beberapa pustaka dalam klasifikasi ini dapat disimpulkan bahwa Taliban merupakan bagian dari gerakan fundamentalis Islam yang memanfaatkan interpretasi sempit dari ajaran Islam guna mencapai tujuan politiknya. Selain itu, juga disimpulkan bahwa upaya mengatasi kelompok fundamentalis Islam yang dilakukan pihak Barat termasuk Amerika Serikat di Afghanistan tidak efektif dalam mengatasi akar permasalahannya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun kekuatan moderat dalam kelompok masyarakat Muslim itu sendiri yang diyakini lebih efektif dalam menghadapi kelompok fundamentalis. Kekuatan kelompok moderat ini juga diharapkan diharapkan dapat lebih mudah diterima oleh kelompok Islam fundamentalis Taliban dalam upaya memoderasi kebijakan Taliban dalam memerintah Afghanistan.

Selain itu, dengan tidak dibukanya sistem demokrasi yang memungkinkan perubahan kelompok politik yang berkuasa, maka sekiranya tidak ada perubahan fundamental, Afghanistan akan tetap berkuasa di Afghanistan. Pendekatan

sanksi, isolasi dan tekanan internasional yang seringkali terutama digunakan Amerika Serikat dan sekutunya untuk memaksa perubahan sistem pemerintahan dalam prakteknya seringkali tidak berhasil. Hal ini antara lain ditulis James Dobbins, Andrew Radin dan Laurel E. Miller dalam tulisan "Engage, Isolate, or Oppose: American Policy Toward the Islamic Emirate of Afghanistan" (James Dobbins, Andrew Radin And Laurel E. Miller, 2022).

Penulis dalam hal ini memberikan contoh kebijakan isolasi dan sanksi Amerika Serikat yang tidak berhasil di Rusia, Kuba, Vietnam dan Iran. Amerika Serikat yang pada awalnya tidak memberikan pengakuan saat terjadinya revolusi atau perubahan regim secara paksa di negara tersebut, pada akhirnya menerima realita dan memberikan pengakuan. Dengan demikian, di masa mendatang perlu dipertimbangkan kembali penerapan kebijakan luar negeri tidak mengakui dan tidak ingin berhubungan dengan Taliban.

Sejak Indonesia merdeka, kebijakan luar negeri negara ini telah dijalankan sesuai dengan prinsip bebas aktif. Prinsip ini dijelaskan dengan tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada paragraf keempat, yang menyatakan: "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Prinsip utama kebijakan luar negeri bebas aktif telah menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjalin hubungan yang baik dengan semua negara, baik negara besar maupun negara kecil, negara maju maupun negara berkembang. Rizal Sukma dalam artikelnya yang dimuat dalam Jurnal Asian Survey, menuliskan prinsip bebas aktif pertama kali diletakkan oleh Wakil Presiden pertama, Muhammad Hatta pada 2 September 1948, dengan empat elemen dasar yaitu: kebijakan luar negeri yang berlandaskan Pancasila; kebijakan luar negeri berlandaskan konstitusi untuk memperjuangkan kepentingan nasional; kepentingan nasional dilaksanakan secara

independen; dan kebijakan luar negeri yang pragmatis sesuai fakta dan kondisi yang dihadapi (Sukma, 1995). Prinsip bebas aktif sampai saat ini masih diterima sebagai landasan kebijakan luar negeri Indonesia dan terus menjadi acuan baik pada masa Orde Baru serta pemerintahan pasca reformasi mulai dari pemerintahan Presiden Habibie sampai Presiden Joko Widodo.

Terkait dengan penelitian ini, prinsip bebas aktif memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dengan memberikan landasan yang fleksibel untuk berinteraksi dengan kelompok tersebut meskipun Indonesia tidak secara resmi mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan. Prinsip bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk tetap menjalin hubungan dengan berbagai pihak dalam upaya memperjuangkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. Meskipun Indonesia tidak mengakui Taliban sebagai pemerintah sah, prinsip bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam upaya perdamaian di Afghanistan. Indonesia dapat menggunakan posisinya yang netral untuk membantu memfasilitasi dialog antara Taliban, pemerintah Afghanistan, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Selain itu, prinsip bebas aktif juga memungkinkan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kepada rakyat Afghanistan tanpa harus melibatkan diri dalam konflik politik internal negara tersebut. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk tetap mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Afghanistan tanpa harus memihak pada pemerintah atau kelompok politik tertentu.

Sehubungan dengan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, setidaknya terdapat 2 faktor penting yang perlu diperhatikan, sebagaimana dituliskan Jean-Frederic Morin dan Jonathan Paquin, dalam bukunya "Foreign Policy Analysis: A Toolbox". Faktor pertama yaitu aktor

non-negara memiliki peran penting dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri (Paquin, 2018). Aktor non-negara dimaksud, termasuk media, organisasi kemasyarakatan, kelompok pakar dan kelompok kepentingan serta pemimpin dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi pendapat publik. Aktor non-negara ini terutama penting di negara-negara demokrasi termasuk Indonesia.

Aleksius Jemadu bahkan lebih jauh lagi menjelaskan dalam bukunya "Analisa Kebijakan Luar Negeri Indonesia Sebagai Kebijakan Publik" bahwa isu luar negeri yang dihadapi Indonesia saat ini sangat kompleks dan seringkali membutuhkan kompetensi teknis yang tidak dimiliki oleh diplomat dan birokrat di Kementerian Luar Negeri (Jemadu, 2023). Aleksius Jemadu dalam hal ini melihat pentingnya koordinasi dan kerja sama erat antar instansi pemerintah serta antar negara dengan aktor non-negara terkait.

Jemadu juga secara khusus memberi contoh pentingnya kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Agama, dan organisasi non-pemerintah Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam upaya promosi *soft power* Indonesia sebagai kekuatan Islam moderat di dunia internasional. Pendekatan *soft power* ini sangat relevan dalam menganalisa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Afghanistan.

Terkait dengan penelitian ini, organisasi keagamaan sebagai aktor non-negara memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Taliban. Salah satu cara utama adalah melalui pengaruh moral dan etika yang dimiliki oleh organisasi keagamaan. Mereka dapat menggunakan ajaran agama untuk mengedepankan nilai-nilai seperti perdamaian, toleransi, dan keadilan dalam pandangan Indonesia terhadap Taliban. Selain itu, organisasi keagamaan sering memiliki jaringan yang luas, termasuk hubungan dekat dengan pemimpin dan elit politik. Melalui

hubungan ini, organisasi keagamaan dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dengan memberikan masukan dan saran kepada para pemimpin tentang sikap yang seharusnya diambil terkait dengan Taliban.

Faktor kedua yang dituliskan Jean-Frederic Morin dan Jonathan Paquin, adalah terkait dengan pengaruh pribadi seorang pemimpin dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini terkait karakter, pengalaman, emosi serta persepsi terhadap suatu situasi dapat mempengaruhi tindakan yang diambil seorang pemimpin terkait kebijakan luar negeri. Pilihan pendekatan *soft power* dalam kebijakan luar negeri Indonesia juga juga dapat dilihat dari perspektif gaya kepemimpinan pembuat kebijakan luar negeri dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Aleksius Jemadu dan Floranesia Lantang dalam artikel tentang kepemimpinan internasional Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, menuliskan bahwa proyeksi kepemimpinan Indonesia di dunia internasional di bawah Presiden Joko Widodo tetap konsisten dengan fokus pragmatisme yang lebih terkait dengan kepentingan politik domestik khususnya dalam mendukung program pembangunan ekonomi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Lantang, 2021). Peneliti melanjutkan bahwa, bahkan kesediaan Indonesia untuk terlibat atau memimpin dalam suatu isu internasional, tidak dapat dilepaskan dari kepentingan langsung Indonesia. Kepemimpinan Indonesia dalam mempromosikan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di dunia internasional merupakan bagian dari upaya Presiden Joko Widodo untuk menaikkan daya saing nasional Indonesia. Hal ini masih sejalan dengan prinsip bebas aktif sebagaimana disampaikan Muhammad Hatta, termasuk elemen kedua terkait kepentingan nasional dan elemen keempat terkait pragmatisme sesuai kondisi yang dihadapi.

3. Metode Penelitian

Sedangkan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi sebagai Menlu wanita pertama di Indonesia memiliki perhatian khusus dan *passion* untuk isu terkait pemberdayaan wanita serta peran wanita dalam pembangunan dan perdamaian internasional. Nur Azizah, Muhammad Ammar, Lintang Cahaya dan Ali Maksun dalam penelitian 'Velvet Triangles' in Women, Peace and Security Agenda in Indonesia, menuliskan sejumlah kebijakan Retno Marsudi yang menunjukkan perhatian khusus dimaksud antara lain: (Nur Azizah, Muhammad Ammar Hidayatulloh, Lintang Cahya Perwita, Ali Maksun, 2021)

1. MoU tahun 2015 antara Kementerian Luar Negeri dan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penerapan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Rangka Penyelenggaraan Hubungan dan Politik Luar Negeri.

2. Roadmap Vision for 4000 Peacekeepers (2015-2019) dengan salah satu agenda utama meningkatkan pasukan penjaga perdamaian wanita Indonesia.

3. Partisipasi aktif dalam Pertemuan Menlu Wanita di Kanada pada 2018 yang secara khusus membahas isu perlindungan dan pemberdayaan wanita.

4. Menjadi inisiator pembentukan Southeast Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediators (SEANWPNM) pada 2019.

5. Menyiapkan draft usulan serta berhasil mendorong adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2538 (2020) tentang Personil Wanita dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.

Terkait dengan penelitian ini, kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sangat penting untuk diperhitungkan dalam analisa penerapan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Taliban. Presiden Joko Widodo, dengan pendekatan yang cenderung untuk mengedepankan kepentingan nasional yang

pragmatis dan realistis, dalam konteks Taliban, berarti pendekatan yang lebih fleksibel dalam berinteraksi dengan kelompok tersebut, terutama dalam upaya memperjuangkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. Sedangkan Menlu Retno Marsudi sebagai diplomat profesional yang cakap dan berpengalaman, berperan penting dalam memfasilitasi dialog antara Indonesia, Taliban, dan pihak terkait lain untuk mendukung upaya perdamaian di Afghanistan termasuk mengangkat isu-isu hak perempuan di Afghanistan.

4. Hasil dan Pembahasan

Kembali berkuasanya pemerintahan Taliban di Afghanistan pada Agustus 2021 telah menciptakan dinamika baru dalam tatanan geopolitik di Asia Selatan serta dalam hubungan luar negeri dengan Indonesia. Indonesia, seperti negara-negara lainnya, menghadapi dilema dalam mengelola hubungan luar negeri dengan Afghanistan. Indonesia ingin terus membangun hubungan yang baik dengan Afghanistan namun di saat yang bersamaan belum bersedia memberikan pengakuan resmi kepada Taliban sebagai pemerintahan yang sah di Afghanistan. Negara-negara belum bersedia memberikan pengakuan kepada Taliban sebagai pemerintahan yang sah di Afghanistan, antara lain mengharapkan di masa mendatang akan ada perubahan sistem pemerintahan di Afghanistan yang lebih inklusif dan tidak hanya didominasi oleh Taliban.

4.1. Identitas: Indonesia sebagai Negara Demokrasi dengan Populasi Muslim Terbesar

Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), pada tahun 2023, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dengan 240,62 juta jiwa, diikuti oleh Pakistan dengan 232,06 juta jiwa, dan India di posisi ketiga dengan 208,57 juta jiwa (Kata Data Media Network, n.d.).

Dari perspektif konstruktivisme, Identitas Indonesia sebagai negara demokratis dengan jumlah penduduk Muslim terbesar memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Identitas Indonesia sebagai negara demokratis juga mencerminkan komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan keadilan, yang mempengaruhi pandangan dan tindakan dalam diplomasi internasional. Selain itu, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, identitas ini juga mencerminkan solidaritas Islam yang turut memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terutama dalam isu-isu yang terkait dengan dunia Islam, seperti konflik Timur Tengah dan isu Afghanistan.

Keberhasilan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dalam menjalankan demokrasi, terutama pasca Reformasi 1998, merupakan sebuah pencapaian yang signifikan dalam konteks global. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru yang otoriter, Indonesia memasuki era Reformasi yang ditandai dengan berbagai perubahan fundamental dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial. Proses demokratisasi ini antara lain ditandai dengan pemilu yang bebas dan adil, kebebasan pers dan penghormatan HAM serta peningkatan partisipasi masyarakat sipil.

Kesuksesan ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, tetapi juga membuktikan bahwa Islam dan demokrasi dapat hidup berdampingan secara harmonis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia membuktikan bahwa prinsip demokrasi dapat diterapkan dalam konteks budaya dan agama yang beragam.

Keberhasilan Indonesia dalam mengharmoniskan Islam dan demokrasi juga meningkatkan kredibilitas Indonesia di panggung internasional. Hal ini antara lain disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa dalam setiap pertemuan dengan pemimpin-pemimpin dunia juga tamu negara-negara yang datang ke Indonesia hal

yang disampaikan dan menjadi modal besar Indonesia adalah bahwa Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia dan juga sekaligus negara demokrasi terbesar di dunia, yang menunjukkan Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan (Kemenag RI, n.d.). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang berhasil menjalankan demokrasi, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara mayoritas Muslim lainnya yang sedang berupaya mengadopsi sistem demokrasi. Kredibilitas ini memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran lebih aktif dalam diplomasi multilateral, termasuk dalam organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN.

Selain itu, keberhasilan demokrasi di Indonesia juga mendorong negara ini untuk lebih vokal dalam isu-isu hak asasi manusia di forum internasional. Indonesia sering mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia dan penyelesaian konflik melalui dialog damai, yang menjadi bagian penting dari kebijakan luar negerinya. Dengan menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi dapat hidup berdampingan secara harmonis, Indonesia memperkuat posisinya sebagai negara yang mendukung perdamaian, stabilitas, dan keadilan di tingkat global.

4.2. Intersubjektifitas: Solidaritas Islam serta Kerja Sama Internasional Penguatan Demokrasi dan Perlindungan HAM

Intersubjektifitas dalam hubungan internasional merujuk pada pemahaman bersama, makna, dan konstruksi sosial yang ada antara aktor seperti negara, organisasi, dan individu. Konstruktivisme melihat bahwa struktur kunci dalam sistem negara bersifat intersubjektif daripada material, yang berarti bahwa struktur ini diciptakan dan dipertahankan melalui interaksi sosial dan kepercayaan bersama.

Selain itu, intersubjektifitas juga menekankan bahwa identitas negara dan

kepentingan nasional adalah hasil dari proses sosial yang dinamis dan terus berubah melalui interaksi dengan aktor-aktor lain. Dinamika itu terjadi antara lain melalui interaksi diplomatik dengan negara lain, keterlibatan dalam forum regional dan global serta interaksi dengan aktor internasional non-negara lainnya.

Pendekatan intersubjektifitas turut memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dengan membentuk identitas dan kepentingannya berdasarkan solidaritas Islam serta komitmen terhadap norma-norma internasional dalam demokrasi dan HAM. Melalui pemahaman dan nilai-nilai bersama ini, Indonesia menavigasi perannya dalam sistem internasional, menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab global. Bukti konkret pengaruh ini terlihat dari inisiatif dan partisipasi Indonesia dalam forum internasional dan regional yang terkait dengan solidaritas Islam serta promosi demokrasi dan perlindungan HAM.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sering kali membentuk kebijakan luar negerinya berdasarkan solidaritas Islam yang terjalin melalui pemahaman dan nilai-nilai bersama dengan negara-negara Muslim lainnya. Solidaritas ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI), di mana Indonesia rutin mengirim delegasi tinggi ke Konferensi Tingkat Tinggi OKI untuk mendiskusikan isu-isu penting, termasuk masalah Palestina dan isu-isu kemanusiaan di negara-negara Muslim. Dukungan Indonesia terhadap Palestina di forum OKI menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mengutuk tindakan yang dianggap melanggar hak-hak rakyat Palestina, sesuai dengan konsensus negara-negara OKI.

Selain itu, Indonesia sering memainkan peran mediasi dalam konflik yang melibatkan negara-negara Muslim, seperti konflik Palestina-Israel. Melalui diplomasi aktif, Indonesia menggalang

dukungan internasional bagi Palestina dan mendorong solusi damai. Di forum internasional seperti PBB, Indonesia mengadvokasi solusi dua negara dan menekan komunitas internasional untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mendukung Palestina.

Melalui partisipasi dalam OKI, peran mediasi dalam konflik Palestina-Israel, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap solidaritas Islam yang terjalin melalui pemahaman dan nilai-nilai bersama dengan negara-negara Muslim lainnya. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks ini tidak hanya mencerminkan solidaritas dengan umat Islam, tetapi juga menekankan pentingnya dialog, kerja sama, dan tindakan kemanusiaan dalam menjaga perdamaian dan keadilan di dunia internasional.

Indonesia juga memanfaatkan pemahaman bersama dan norma-norma internasional dalam mempromosikan demokrasi dan perlindungan HAM sebagai bagian integral dari kebijakan luar negerinya. Dengan berfokus pada dialog, kerja sama, dan pertukaran pengalaman, Indonesia berupaya memperkuat fondasi demokrasi dan HAM baik di tingkat regional maupun global.

Di tingkat internasional, Indonesia telah aktif dalam Dewan HAM PBB sebagai anggota pendiri pada 2006–2007. Indonesia telah terpilih kembali sebagai anggota beberapa kali dan terakhir terpilih untuk periode 2024–2026. Prioritas Indonesia dalam periode keanggotaan 2024–2026 adalah meningkatkan kapasitas global dalam perlindungan HAM, meningkatkan intensitas dialog HAM di tingkat global dan regional, serta memperkuat implementasi nilai universal hak asasi manusia (Kemenlu RI, n.d.)

Sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia telah berperan dalam mengadvokasi dialog konstruktif dan kerja sama internasional dalam menangani isu-isu HAM di seluruh dunia. Melalui partisipasinya dalam mekanisme Universal

Periodic Review (UPR) PBB, Indonesia telah memberikan masukan yang berharga untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan HAM di berbagai negara. Upaya Indonesia dalam memperkuat demokrasi dan HAM juga telah memberikan dampak positif di dalam negeri, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai demokrasi dan HAM dalam pembangunan berkelanjutan.

Di tingkat regional, Indonesia ikut serta dalam pembentukan badan khusus HAM dalam kerangka kerja kerjasama ASEAN dan OKI. Sementara itu, di tingkat global, Indonesia aktif dalam membahas berbagai isu HAM, baik melalui mekanisme HAM PBB maupun di luar mekanisme tersebut (Kemenlu RI, n.d.).

Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk melakukan kerjasama di bidang pemajuan dan perlindungan HAM pada berbagai tataran termasuk bilateral, Indonesia telah terlibat aktif dalam dialog dan konsultasi HAM bilateral. Hingga 2019, Indonesia telah memiliki dialog dan konsultasi HAM bilateral dengan Norwegia, Uni Eropa, Rusia, Iran, Swedia, serta Kanada (Kemenlu RI, n.d.).

Dalam isu kesetaraan gender dan hak anak, Indonesia telah menjadi salah satu anggota pendiri Equal Futures Partnership (EFP) sejak dimulainya pada tahun 2012. Diskusi dalam inisiatif EFP berfokus pada kesetaraan gender dalam politik dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Pada 2015, Presiden Joko Widodo setuju untuk menjadi salah satu dari delapan Kepala Negara atau Pemerintah yang menjadi IMPACT Leaders (Kemenlu RI, n.d.).

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang berfokus pada pemahaman bersama dan norma-norma internasional dalam mempromosikan demokrasi dan perlindungan HAM telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya global untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan HAM. Melalui kerja sama

internasional dan komitmen terhadap nilai-nilai universal ini, Indonesia terus berperan sebagai pemimpin regional yang aktif dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemajuan bagi semua negara dan masyarakat.

4.3. Kebijakan Luar Negeri Indonesia untuk Afghanistan dan Pengaruh Pendekatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Menghadapi perubahan politik di Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021, Indonesia memiliki kepentingan strategis yang perlu analisis melalui pendekatan konstruktivisme dalam studi hubungan internasional. Pendekatan konstruktivisme, yang melihat pentingnya identitas, norma, dan konstruksi sosial dalam membentuk perilaku negara, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana identitas dan kepentingan Indonesia terbentuk dan berinteraksi dengan dinamika politik baru di Afghanistan.

Kembalinya pemerintahan Taliban telah mengubah secara signifikan situasi politik dan keamanan di wilayah tersebut, yang memaksa Indonesia untuk meninjau kembali strategi luar negerinya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sebagai anggota aktif dalam berbagai organisasi internasional, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara dan dunia Islam. Pendekatan konstruktivisme memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada aspek material seperti kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga pada bagaimana norma-norma internasional dan identitas nasional Indonesia berinteraksi dengan perubahan di Afghanistan.

Sebelumnya, juga penting untuk memahami sejarah dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Afghanistan. Memahami latar belakang ini akan memberikan konteks yang lebih jelas terhadap kepentingan strategis dan

langkah-langkah diplomatik yang diambil oleh Indonesia dalam merespons perubahan politik di Afghanistan setelah kembalinya Taliban berkuasa pada 2021.

Merujuk informasi yang terangkum dalam arsip Kementerian Luar Negeri RI dipahami bahwa sejak Afghanistan secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 September 1947, hubungan diplomatik antara kedua negara telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan yang mencerminkan dinamika politik dan diplomasi di tingkat internasional dan regional.

Pendirian Perwakilan RI di Kabul pada tanggal 20 Desember 1949, dengan nama Representative of the United States of Indonesia (RIS), menandai langkah awal dalam memperkuat hubungan bilateral. Namun, ketika RIS berubah menjadi Negara Kesatuan RI, kantor Perwakilan RI di Kabul juga mengalami perubahan menjadi Legation of the Republic of Indonesia, dengan kepala perwakilan setingkat Duta Besar.

Tahun 1955 menjadi titik balik dalam sejarah hubungan diplomatik Indonesia-Afghanistan, di mana Treaty of Friendship ditandatangani di Bandung, menandai dimulainya hubungan diplomatik resmi antara kedua negara. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus, terutama selama periode konflik dan ketegangan di tingkat internasional.

Pada September 1953, Perwakilan RI di Kabul ditutup dan dirangkap oleh KBRI New Delhi. Namun, hubungan diplomatik kembali diperkuat dengan dibukanya kembali Perwakilan RI di Kabul pada 1956, dengan status kedutaan besar pada 1960. Pada 1979 hingga 1989, Indonesia menarik Duta Besarnya untuk Afghanistan sebagai bentuk protes atas invasi Uni Soviet ke negara tersebut. Selama delapan tahun, mulai dari 1980 hingga 1988, terjadi kekosongan dalam kepemimpinan Duta Besar.

Saat Taliban berkuasa di Afghanistan untuk pertama kalinya pada

periode 1996 hingga 2001, KBRI Kabul ditutup karena alasan keamanan. Kepentingan Indonesia di Afghanistan dirangkap oleh KBRI Islamabad selama periode tersebut. KBRI Kabul kembali beroperasi di Afghanistan pada awal 2004, tetapi kemudian ditutup kembali karena situasi politik yang tidak stabil. Dengan kembalinya Taliban ke kekuasaan pada Agustus 2021, KBRI Kabul kembali mengalami pindah sementara ke Islamabad.

Pada tanggal 21 Desember 2021, KBRI Kabul kembali beroperasi di Afghanistan dengan status Kantor Misi Kemanusiaan RI. Ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan serta mendukung upaya perdamaian dan rekonstruksi di Afghanistan.

Dengan sejarah yang panjang dan beragam, hubungan diplomatik Indonesia-Afghanistan terus berkembang sesuai dengan dinamika politik dan keamanan global. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kedua negara terus berupaya untuk memperkuat kerja sama dan menjaga hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Tanggal	Peristiwa
27 September 1947	Afghanistan secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia.
20 Desember 1949	Pendirian Perwakilan RI di Kabul dengan nama Representative of the United States of Indonesia.
September 1953	Perwakilan RI di Kabul ditutup dan dirangkap oleh KBRI New Delhi.
1955	Treaty of Friendship ditandatangani di Bandung, menandai dimulainya hubungan diplomatik resmi antara Republik Indonesia dan Afghanistan.
24 April 1955	Hubungan diplomatik Indonesia - Afghanistan secara resmi dimulai dengan penandatanganan Treaty of Friendship di Bandung.

1956	Perwakilan RI di Kabul dibuka kembali dengan status kedutaan besar.
1960	Perwakilan RI di Kabul meningkat statusnya menjadi Kedutaan Besar.
1980–1988	Indonesia menarik Duta Besarnya untuk Afghanistan sebagai protes atas invasi Uni Soviet ke negara tersebut.
1996–2001	KBRI Kabul ditutup saat Taliban berkuasa pertama kali di Afghanistan.
Awal 2004	KBRI Kabul kembali beroperasi di Afghanistan.
20 Agustus 2021	KBRI Kabul mengalami pindah sementara ke Islamabad setelah kembalinya Taliban ke kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus 2021.
21 Desember 2021	KBRI Kabul kembali beroperasi di Kabul.

Tabel 4.3.1. Ringkasan sejarah hubungan diplomatik Indonesia – Afghanistan (diolah dari Arsip Kementerian Luar Negeri RI)

Pada saat Taliban merebut kekuasaan tahun 1996 KBRI Kabul ditutup dan dirangkap oleh KBRI Islamabad sampai dengan tahun 2004. Sedangkan saat Taliban Kembali berkuasa tahun 2021, KBRI Kabul tetap beroperasi sampai saat ini meskipun tanpa Duta Besar.

Hasil wawancara dengan Direktur Asia Selatan dan Tengah, Kememlu RI, Jatmiko Heru Prasetyo (Prasetyo, 2024), diperoleh informasi bahwa perbedaan kebijakan ini dilakukan atas pertimbangan situasional yang berbeda dan hal ini tidak berarti Indonesia pernah memutuskan hubungan diplomatik dengan Afghanistan. Situasi saat pertama kali Taliban berkuasa tahun 2016 ditandai dengan tingkat ancaman keamanan yang sangat tinggi sehingga mengancam keselamatan personil dan efektifitas KBRI Kabul. Selain itu pemerintahan Taliban juga pada awalnya tidak memiliki tata cara hubungan dengan komunitas internasional yang jelas.

Hal ini berbeda dengan kembali berkuasanya Taliban pada Agustus 2021, dimana selain serangan militer, Taliban juga telah melakukan praktek diplomasi

melalui negosiasi perdamaian di Qatar dimana Indonesia juga terlibat antara lain dengan kegiatan Dialog Ulama. Selain itu ada level kepercayaan komunitas internasional dan harapan bahwa Taliban akan juga mengikut norma dan hukum internasional. Komunitas internasional menaruh harapan atas janji Taliban saat awal berkuasa kembali yaitu penghormatan HAM, inklusifitas pemerintahan serta tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat berkembangnya kelompok teroris.

Pemenuhan ketiga hal pokok yang dijanjikan Taliban tersebut, juga menjadi parameter bagi komunitas internasional termasuk Indonesia sebelum memberikan pengakuan diplomatik kepada Taliban sebagai penguasa Afghanistan yang sah. Namun demikian Indonesia terus konsisten menjaga hubungan diplomatik dengan Afghanistan tanpa memberikan pengakuan terhadap Taliban. Indonesia dalam hal ini tetap aktif melakukan *constructive engagement* dengan Taliban dalam rangka misi kemanusiaan untuk membantu perdamaian di Afghanistan.

Jatmiko Prasetyo (Prasetyo, 2024) juga menginformasikan bahwa Kedubes Afghanistan di Jakarta hingga saat penulisan ini dibuat (Mei 2024) tetap diakui sebagai Kantor Perwakilan diplomatik Afghanistan dan diterima melakukan komunikasi dengan Kemenlu RI, namun dengan status qua tanpa adanya penerimaan baru diplomat ataupun Duta Besar Afghanistan. Kantor Perwakilan RI di Kabul juga tetap beroperasi normal *act like Embassy* dengan nama Kantor Misi Kemanusiaan RI, dengan dipimpin oleh Kuasa Usaha Tetap yang diakui dan dapat melakukan komunikasi dengan pemerintahan Taliban.

Kembalinya Taliban ke kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021 mengakhiri hampir dua dekade pemerintahan dibawah pengaruh Amerika Serikat dan sekutunya di negara itu. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan berbagai reaksi dan perdebatan di tingkat

internasional, tetapi juga mengingatkan dunia internasional pada masa lalu gelap Afghanistan di bawah pemerintahan mereka antara 1996 dan 2001.

Pada periode tersebut, rezim Taliban di Afghanistan dikenal karena menerapkan hukum Islam yang keras dan otoriter. Wanita dilarang bekerja di luar rumah, pendidikan bagi perempuan dibatasi, dan hukuman fisik yang keras diterapkan sebagai bentuk disiplin. Selain itu, Taliban juga memberikan perlindungan kepada kelompok ekstremis internasional, seperti Al-Qaeda, yang menjadi alasan utama intervensi militer oleh Amerika Serikat dan sekutunya pada 2001.

Meskipun kejatuhan Taliban pada 2001 membuka jalan bagi perubahan positif di Afghanistan, seperti peningkatan akses pendidikan dan kebebasan sipil, pemerintahan yang baru juga dihadapkan pada tantangan besar. Korupsi, instabilitas politik, dan ancaman terorisme terus mengganggu proses rekonstruksi negara. Akhirnya, setelah hampir dua dekade berada di Afghanistan, Amerika Serikat mengumumkan penarikan pasukan mereka, memberikan kesempatan bagi Taliban untuk merebut kembali kekuasaan.

Kembalinya Taliban ke kekuasaan pada 2021 menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Afghanistan dan hubungan dengan komunitas internasional yang masih enggan mengakui Taliban sebagai pemerintah sah Afghanistan. Pasca merebut kekuasaan, Taliban menghadapi tantangan untuk mendapatkan legitimasi internasional. Meskipun mereka berjanji membentuk pemerintahan yang lebih inklusif dan moderat, banyak negara masih ragu-ragu untuk mengakui keabsahan pemerintahan Taliban.

Sejak awal, Indonesia telah menunjukkan perhatian terhadap situasi di Afghanistan dan aktif mendukung upaya perdamaian serta rekonstruksi di negara tersebut. Namun, dengan kembalinya Taliban, Indonesia dihadapkan pada tantangan baru dalam menjalin hubungan

dengan Afghanistan. Bagaimana Indonesia menanggapi kembalinya Taliban dan bagaimana hal ini memengaruhi dinamika hubungan bilateral antara kedua negara menjadi pertanyaan penting dalam analisis konstruktivisme terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.

Selain itu, dalam perspektif konstruktivisme, penting untuk melihat bagaimana identitas nasional Indonesia dan norma-norma internasional mempengaruhi kebijakan luar negerinya terhadap Afghanistan. Dalam analisis konstruktivisme terhadap kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Afghanistan, peran aktor-aktor domestik dan internasional juga penting untuk diperhatikan. Bagaimana pandangan masyarakat Indonesia, terutama kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan khusus terhadap Afghanistan, memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia? Begitu juga dengan bagaimana interaksi Indonesia dengan aktor-aktor internasional, seperti negara-negara tetangga dan organisasi internasional, memengaruhi konstruksi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Afghanistan.

Perlindungan dan pemberdayaan perempuan menjadi komitmen yang kuat bagi Indonesia. Dalam konteks Afghanistan, Indonesia akan terus memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama di bawah pemerintahan Taliban yang memiliki catatan kontroversial terkait hak-hak perempuan. Indonesia dapat memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan perempuan Afghanistan. Selain itu, Indonesia juga dapat menggunakan platform internasional untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak perempuan di Afghanistan.

Dengan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan, Indonesia memiliki peran yang penting dalam

memperjuangkan nilai-nilai ini di tingkat global. Dalam konteks hubungan dengan Afghanistan, Indonesia memiliki kesempatan untuk menggunakan kebijakan luar negerinya sebagai alat untuk mempromosikan nilai-nilai ini dan membantu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi rakyat Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Dengan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, Indonesia dapat menjadi aktor yang berpengaruh dalam membentuk masa depan Afghanistan yang lebih stabil dan sejahtera.

Hasil wawancara dengan Direktur Asia Selatan dan Tengah, Kemenlu RI, Jatmiko Heru Prasetyo (Prasetyo, 2024), diperoleh informasi bahwa meskipun hubungan diplomatik dengan Afghanistan tidak pernah putus, namun pengakuan resmi belum diberikan kepada Taliban karena Indonesia masih menunggu pemerintahan transisi Afghanistan saat ini yang dipimpin Taliban untuk dapat memenuhi janjinya terutama terkait nilai dan norma demokrasi yang mengedepankan inklusifitas dalam pemerintahan serta penghormatan HAM khusus perlindungan terhadap perempuan. Karena sejak Taliban berkuasa kembali hingga saat ini, masih terjadi kemunduran dari demokrasi penghormatan HAM yang telah dibangun sebelumnya. Dari sisi perlindungan perempuan juga masih terdapat sejumlah kebijakan Taliban yang mengekang hak-hak perempuan seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Indonesia juga melihat dan berkomunikasi dengan komunitas internasional, termasuk status quo dari Perwakilan Afghanistan di PBB serta belum adanya pengakuan resmi bagi Taliban dari semua negara.

Terkait dengan identitas sebagai negara demokratis dengan populasi Islam terbesar dunia, Indonesia turut mempromosikan Islam yang rahmatan lil 'alamin sebagai bentuk kontribusi bagi perdamaian dunia. Dalam pendekatan

kepada Taliban, Indonesia menggunakan pemahaman sebagai “*brother*” sesama negara Muslim dan mempromosikan Islam yang moderat kepada Taliban. Indonesia dalam hal ini mendapatkan kepercayaan dari Taliban dan melihat Indonesia sebagai negara yang tidak punya agenda tersembunyi yang merugikan Afghanistan.

Indonesia juga dalam hal ini menggunakan posisinya yang berpengaruh di OKI untuk menggalang solidaritas dunia Islam untuk membantu Afghanistan, yang antara lain ditunjukkan dengan keberhasilan membentuk Afghanistan Humanitarian Trust Fund, di sela-sela pertemuan ke-48 Menteri Luar Negeri OKI di Pakistan pada 19 Desember 2022 (Islamic Development Bank, n.d.).

Posisi Indonesia sebagai negara Islam moderat, juga dipandang positif sebagai “*sincere broker*” bukan hanya dari negara-negara Muslim namun juga dari komunitas internasional termasuk negara-negara Barat. Dalam beberapa program bantuan yang akan dilakukan negara Barat, Indonesia diberikan kepercayaan yang menjembatani komunikasi dengan Taliban. Bahkan beberapa program beasiswa dengan biaya dari negara Barat, diarahkan untuk dapat dilakukan di Indonesia, tentunya bermitra dengan pemerintah Indonesia.

Meskipun Indonesia memposisikan diri sebagai “*brother*” Afghanistan, hal itu tidak berarti Indonesia selalu *soft* dan tidak pernah mengkritisi kebijakan Afghanistan. Justru bukti dari ketulusan niat Indonesia, ditunjukkan dengan sikap tegas menyuarakan keprihatinan atas berbagai kebijakan Taliban terutama yang mengekang hak-hak perempuan.

Sikap Indonesia ini secara jelas tergambar dalam pernyataan Menlu RI pada pertemuan Neighboring Countries of Afghanistan + Afghanistan Foreign Ministers’ Dialogue di China pada 29-31 Maret 2022, yaitu (diolah dari data arsip Kemenlu RI): pertama, pentingnya pemenuhan janji-janji yang telah diucapkan oleh pihak Taliban, khususnya terkait

terorisme, HAM dan inklusivitas pemerintahan; kedua, perlunya memprioritaskan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Afghanistan yang menghadapi krisis; ketiga, pentingnya memberikan bantuan ekonomi dan pembangunan guna mendukung stabilitas dan kemajuan jangka panjang di Afghanistan; dan keempat, pentingnya membangun kepercayaan antara Taliban dan komunitas internasional, yang merupakan langkah krusial untuk mencapai perdamaian dan stabilitas regional.

Pernyataan sikap Indonesia ini juga disampaikan langsung oleh Menlu RI dalam pertemuan dengan pejabat Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi di Doha pada 29 Maret 2022, untuk membahas larangan sekolah bagi perempuan di Afghanistan (Detik.com, n.d.). Sikap Indonesia ini dapat diterima Afghanistan dengan memberi pengecualian bagi sejumlah siswa perempuan Afghanistan untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi di Indonesia.

Terkait dengan bantuan program pendidikan yang diberikan pemerintah Indonesia pasca kembali berkuasanya Taliban, antara lain sebagai berikut (diolah dari data arsip Kemenlu RI):

1. Pada tahun 2022, Kemenlu RI dan LDKPI memberikan 5 beasiswa bagi mahasiswa Afghanistan yang mengambil studi pascasarjana di Universitas Islam Internasional Indonesia.

2. Pada tahun akademik 2023, terdapat empat mahasiswa pascasarjana Afghanistan diterima untuk berkuliah di UIII dalam skema kerja sama LDKPI dan 9 mahasiswa pascasarjana Afghanistan diterima untuk berkuliah di UMY dalam skema kerja sama LDKPI dan Adaro Energy Indonesia.

3. Secara terpisah untuk tahun ajaran 2023-2024, Kemendikbud RI memberikan beasiswa KNB bagi lima mahasiswa Afghanistan untuk studi pascasarjana di berbagai universitas di Indonesia.

4. Pada tahun akademik 2024, Pemerintah Indonesia akan memberikan 12 beasiswa pascasarjana untuk mahasiswa Afghanistan, masing-masing 4 orang di UMY dan 8 orang di UIII. Di samping itu, sebagai hasil tindak lanjut ICAWE, UPH dan Lippo Group akan memberikan beasiswa pascasarjana untuk 5 orang setiap tahun dalam periode 3 tahun akademik.

Penulis sebagai Staf Kemenlu RI berkesempatan turut terlibat dalam kegiatan International Conference on Afghan Women's Education (ICAWE) pada 8 Desember 2022. Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat komitmen yang kuat dari Menlu RI, Retno Marsudi untuk menggalang dukungan internasional bagi perlindungan hak perempuan Afghanistan, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Komitmen ini didukung juga oleh kelompok masyarakat di Indonesia yang juga terlibat aktif dalam kegiatan ICAWE dimaksud, antara lain Afghanistan-Indonesia Women's Solidarity Network (AISWN) serta kelompok organisasi keagamaan besar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah.

Terkait dengan sistem demokrasi, Indonesia secara konsisten mendorong Taliban untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dengan melibatkan berbagai golongan di Afghanistan. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia yang juga sukses menjalankan demokrasi membuka diri untuk *sharing experiences* dan *best practices* dengan negara-negara lainnya tanpa mendikte negara lain untuk bisa mencontoh Indonesia.

Bagi Indonesia untuk konteks Afghanistan saat ini prioritas utama adalah bantuan kemanusiaan dan dukungan bagi wanita Afghanistan, sehingga dalam kebijakan luar negeri mengutamakan pendekatan "*humanity beyond politics*". Dalam prakteknya meskipun Indonesia belum memberikan pengakuan kepada Taliban namun Indonesia tetap menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Afghanistan dengan berkoordinasi dengan

Taliban. Mengatasi kendala ini, pemerintah Indonesia secara resmi menyalurkan bantuan melalui organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Afghanistan khususnya melalui Organisasi PBB dan Agha Khan Foundation serta Palang Merah Internasional. Pasca kembali berkuasanya Taliban, program bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia antara lain (data diolah dari arsip Kemenlu RI):

1. Pada High-Level Ministerial Meeting on the Humanitarian Assistance in Afghanistan yang diinisiasi PBB di Jenewa tanggal 13 September 2021, Menlu RI menyampaikan komitmen pledge senilai USD3 juta yang terdiri dari USD2,85 juta untuk program pembangunan kapasitas dan USD150.000 bantuan kemanusiaan ke Afghanistan.

2. Pada 9 Januari 2022, Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan 65 ton pangan dan nutrisi yang disalurkan melalui World Food Programme (WFP) Afghanistan.

3. Pada 7 Maret 2024, Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan 10 juta dosis vaksin polio bOPV ke Afghanistan yang disalurkan melalui UNICEF.

Jatmiko Prasetyo (Prasetyo, 2024) meyakini berbagai pendekatan konstruktif dengan menggunakan "*Islamic language*" nilai-nilai Islam Wasatiah serta tetap merangkul Taliban sebagai kelompok politik, memberikan dampak positif dan memperkuat kelompok yang lebih moderat dalam faksi di Taliban. Meskipun Taliban saat ini masih konservatif, namun berbeda dengan Taliban tahun 1996 – 2001, mulai ada kesadaran untuk beberapa faksi di Taliban untuk dapat melakukan pembaharuan positif yang dibutuhkan Afghanistan. Sejumlah kebijakan Taliban yang positif yang dapat diapresiasi antara lain, kebijakan anti korupsi, komitmen tidak mengizinkan beroperasinya kelompok teroris serta kebijakan pemusnahan ladang-ladang opium di Afghanistan.

Pendekatan yang konstruktif dengan Taliban juga mendorong Taliban

untuk lebih membuka diri untuk melakukan komunikasi dan kerja sama dengan komunitas internasional. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi Taliban dalam sejumlah pertemuan internasional terutama yang paling mencolok adalah partisipasi resmi pemerintahan Taliban sebagai perwakilan Islamic Emirate of Afghanistan (IEA) pada KTT ke-15 OKI di Gambia, Mei 2024 (Anadolu Ajansi, n.d.).

Selain membangun kepercayaan dan mendorong Taliban untuk memenuhi komitmen mereka terhadap hak asasi manusia, pendidikan, dan hak-hak perempuan, pendekatan konstruktif juga membuka peluang bagi Taliban untuk mendapatkan dukungan internasional dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan ekonomi, yang sangat dibutuhkan untuk membangun kembali Afghanistan pasca-konflik. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi isolasi Afghanistan dan mengintegrasikannya kembali ke dalam komunitas internasional, sekaligus dapat diberikan insentif kepada Taliban untuk berkomitmen kepada nilai dan norma internasional terutama terkait tiga harapan utama komunitas internasional, yaitu tidak mengizinkan Afghanistan menjadi basis kelompok teroris, penghormatan hak asasi manusia, serta membangun pemerintahan yang inklusif.

5. Kesimpulan

Hubungan Taliban dengan komunitas internasional sangat kompleks sejak awal berkuasa kembali di Afghanistan pada Agustus 2021. Pemerintahan Taliban sampai saat ini masih tidak diakui oleh semua negara di dunia. Meskipun Taliban berjanji untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, menghormati hak asasi manusia serta tidak menjadi basis kelompok teroris, komunitas internasional memilih untuk menunggu tindakan konkret sebagai bukti keseriusan Taliban sebelum memberikan pengakuan kepada Taliban sebagai pemerintah yang sah di Afghanistan.

Sambil mengharapkan perubahan kebijakan Taliban yang lebih moderat, komunitas internasional, termasuk Indonesia juga dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan pendekatan yang lebih realistis terhadap Taliban dengan mempertimbangkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. Hal ini penting karena menolak untuk berinteraksi dengan Taliban secara total dapat mengisolasi mereka dan mempersulit proses mencapai perdamaian dan pembangunan di Afghanistan dan upaya memperjuangkan penerapan nilai-nilai dan norma internasional di Afghanistan. Selain itu, mempertimbangkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan juga berarti mencari cara untuk mendorong Taliban agar terlibat dalam proses politik yang lebih inklusif. Memberikan insentif kepada Taliban untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang lebih moderat dan terbuka dapat membantu mengurangi ketegangan dan kekerasan di Afghanistan, yang pada akhirnya dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini menganalisis tantangan dan hambatan utama yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan hubungan luar negeri dengan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban, serta menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia pasca kembalinya Taliban berkuasa pada tahun 2021 menggunakan pendekatan konstruktivisme.

Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan pengakuan internasional terhadap pemerintahan Taliban yang kontroversial. Sampai saat ini belum ada negara yang memberikan pengakuan resmi kepada pemerintahan Taliban karena sejumlah kebijakan dan tindakan kontroversial yang dilakukan oleh rezim tersebut. Hal ini menciptakan dilema bagi Indonesia, yang pada satu sisi ingin menjaga hubungan baik dengan Afghanistan namun juga harus mempertimbangkan posisi dan nilai yang dipegang teguh komunitas internasional.

Selain itu, tantangan lainnya datang dari kebijakan-kebijakan Taliban yang masih dianggap kontroversial dan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dianut Indonesia, seperti pembatasan terhadap hak-hak perempuan, kurangnya inklusivitas dalam pemerintahan, serta kecenderungan untuk menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini menciptakan dilema etis bagi Indonesia dalam menjalankan hubungannya dengan Afghanistan, karena Indonesia sebagai negara demokratis yang menghargai hak asasi manusia harus mempertimbangkan nilai-nilai tersebut dalam setiap interaksi luar negeri, namun di sisi lain juga harus mempertimbangkan realitas politik dan keamanan di kawasan tersebut.

Berdasarkan analisa konstruktivisme kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Afghanistan dibawah Taliban, Indonesia tidak hanya melihat pertimbangan politik, keamanan dan ekonomi namun juga memperhatikan nilai dan norma universal khususnya terkait prinsip penghormatan terhadap HAM dan pemerintahan yang inklusif serta menjunjung prinsip-prinsip demokrasi. Komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, termasuk perlindungan perempuan menjadi landasan utama dalam kebijakan luar negerinya terhadap Afghanistan.

Namun demikian Indonesia tidak menerapkan kebijakan isolasi dan memaksa terhadap Taliban dan tetap melakukan pendekatan konstruktif dengan Afghanistan. Indonesia memiliki tradisi kebijakan luar negeri yang independen dan tidak memihak, yang mengutamakan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk tetap berkomunikasi dengan pemerintah Taliban untuk membangun hubungan yang konstruktif.

Identitas Indonesia sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim moderat terbesar di dunia juga

memengaruhi pendekatan Indonesia terhadap Taliban. Sebagai negara yang menganut Islam yang moderat, Indonesia cenderung mengedepankan nilai-nilai dialog, toleransi, dan kerjasama dalam menyelesaikan konflik serta membangun kembali Afghanistan. Pendekatan ini tercermin dalam upaya Indonesia untuk menjalin hubungan yang konstruktif dengan Taliban, dengan tujuan untuk memfasilitasi dialog antara pihak yang berkonflik dan mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan di Afghanistan. Pendekatan konstruktif Indonesia terhadap Taliban tersebut telah memberikan dampak positif, seperti membuka dialog dan kerja sama antara Taliban dan komunitas internasional, serta membantu Taliban untuk memahami pentingnya mematuhi norma internasional.

Indonesia juga telah memberikan bantuan kemanusiaan dan pendidikan kepada Afghanistan sebagai wujud kontribusi konkret dalam mendukung perdamaian dan pembangunan di Afghanistan pasca-konflik. Melalui bantuan kemanusiaan dan pendidikan yang diberikan, Indonesia tidak hanya memberikan kontribusi langsung kepada rakyat Afghanistan tetapi juga menegaskan posisinya sebagai aktor global yang peduli terhadap isu kemanusiaan dan perdamaian. Dengan pendekatan ini, Indonesia telah menunjukkan bahwa dialog dan kerjasama dapat menjadi jalan yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik daripada isolasi dan konfrontasi. Secara keseluruhan, pendekatan Indonesia terhadap Taliban dan situasi di Afghanistan menunjukkan bahwa Indonesia telah memainkan peran yang positif dalam upaya membangun perdamaian dan stabilitas di negara tersebut. Dengan mengedepankan dialog, kerja sama, dan bantuan kemanusiaan, Indonesia telah menunjukkan arah kebijakan untuk mendukung upaya rekonstruksi pasca-konflik dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian di Afghanistan.

Posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memberikan *leverage* penting dalam berhubungan dengan Taliban, termasuk dalam mengangkat isu-isu kontroversial seperti hak-hak wanita. Sebagai negara yang dihormati di kalangan negara-negara Muslim, Indonesia memiliki kredibilitas untuk menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan-kebijakan Taliban yang membatasi hak-hak wanita, khususnya terkait pendidikan dan pekerjaan. Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi yang menghormati prinsip-prinsip Islam sambil tetap menekankan pentingnya hak asasi manusia dan kesetaraan gender, menciptakan ruang dialog yang konstruktif dengan Taliban. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia telah menyuarakan kritik terhadap kebijakan Taliban yang mengeksklusi perempuan dari ruang publik dan pendidikan. Misalnya, dalam forum-forum internasional dan pertemuan bilateral, perwakilan Indonesia telah menekankan pentingnya pendidikan bagi semua, termasuk perempuan, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan stabilitas sosial. Indonesia berusaha menggunakan pendekatan yang persuasif, mengedepankan dialog dan kerja sama daripada konfrontasi langsung, dengan harapan dapat mendorong perubahan positif dalam kebijakan Taliban terkait hak-hak perempuan.

Selain itu, Indonesia melihat keterlibatannya di Afghanistan sebagai bagian dari upaya membangun solidaritas Islam yang lebih kuat. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu negara-negara Muslim lainnya dalam menghadapi tantangan mereka. Bantuan kemanusiaan, program pelatihan, dan diplomasi yang

dilakukan Indonesia di Afghanistan tidak hanya bertujuan untuk membantu rakyat Afghanistan, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa negara-negara Muslim dapat saling mendukung dalam mencapai perdamaian dan kemajuan.

Melalui keterlibatannya di Afghanistan, Indonesia berusaha memperkuat kepemimpinannya di dunia Islam yang mampu mengadvokasi solusi damai dan inklusif. Indonesia telah berhasil mendapatkan pengakuan dunia internasional atas pendekatannya yang moderat dan inklusif, dan keterlibatannya di Afghanistan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan memperkuat citra tersebut. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia aktif mempromosikan dialog dan rekonsiliasi antar kelompok di Afghanistan, dengan harapan dapat memberikan contoh positif bagi negara-negara lain yang menghadapi konflik serupa.

Melalui pendekatan nilai dan identitasnya, Indonesia berupaya membangun dunia sosial yang inklusif, damai, dan menghormati hak asasi manusia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang berhasil menjalankan demokrasi, Indonesia ingin menampilkan dirinya sebagai model keberhasilan dalam menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks hubungan internasional, terutama dengan negara-negara yang mengalami konflik seperti Afghanistan, Indonesia menggunakan pendekatan yang mengedepankan dialog, diplomasi damai, dan kerja sama internasional. Dengan cara ini, Indonesia berusaha menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan seiring, serta bahwa nilai-nilai Islam dapat mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- (2023, July 26). Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230726122140-4-457446/diam-diam-taliban-datang-ke-jakarta-ada-apa>
- (2023, March 25). Retrieved from Associated Press: <https://apnews.com/article/taliban-diplomatic-missions-control-211b8b01a66e1baa7c33d57a4dcdbdce>.
- (n.d.). *Arsip Kementerian Luar Negeri RI tahun 2021 - 2024*.
- (n.d.). Retrieved May 10, 2024, from Detik.com: <https://news.detik.com/internasional/d-6005467/menlu-retno-bertemu-taliban-minta-perempuan-afghanistan-kembali-sekolah>
- (n.d.). Retrieved May 10, 2024, from Kemenlu RI: [https://www.kemlu.go.id/bangkok/id/news/26710/indonesia-kembali-terpilih-sebagai-anggota-dewan-ham-pbb-periode-2024-2026#:~:text=Pada%20tanggal%2010%20Oktober%202023,APG\)%20periode%202024%2D2026](https://www.kemlu.go.id/bangkok/id/news/26710/indonesia-kembali-terpilih-sebagai-anggota-dewan-ham-pbb-periode-2024-2026#:~:text=Pada%20tanggal%2010%20Oktober%202023,APG)%20periode%202024%2D2026).
- (n.d.). Retrieved May 13, 2024, from Kemenlu RI: https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia
- (n.d.). Retrieved May 13, 2024, from Kemenlu RI: https://kemlu.go.id/portal/id/read/85/halaman_list_lainnya/dialog-ham-bilateral.
- (n.d.). Retrieved May 13, 2024, from Kemenlu RI: https://kemlu.go.id/portal/id/read/59/halaman_list_lainnya/peran-aktif-pemerintah-indonesia-dalam-berbagai-inisiatif-ham-internasional.
- (n.d.). Retrieved May 13, 2024, from Kemenlu RI: https://kemlu.go.id/portal/id/read/97/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia.
- (n.d.). Retrieved May 17, 2024, from Kemenag RI: <https://kemenag.go.id/nasional/presiden-islam-dan-demokrasi-di-indonesia-bisa-berjalan-beriringan-x1wu93>.
- (n.d.). Retrieved May 18, 2024, from Anadolu Ajansi: <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/interim-taliban-government-takes-part-in-15th-oic-summit/3210782>.
- (n.d.). Retrieved May 20, 2024, from Kata Data Media Network: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.
- (n.d.). Retrieved May 8, 2024, from Kemenlu RI: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5557/berita/bcsmf-2023-dialog-progresif-untuk-menguatkan-demokrasi-di-asia-pasifik>.

- Azizah, N., Muhammad Ammar Hidayatulloh, Lintang Cahya Perwita, Ali Maksum. (2021). 'Velvet Triangles' in Women, Peace and Security Agenda in Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10.
- Dobbins, J., Andrew Radin, and Laurel E. Miller. (2022). *Engage, Isolate, or Oppose: American Policy Toward the Islamic Emirate of Afghanistan*. RAND Corporation.
- Erbas, I. (2022). Constructivist Approach in Foreign Policy and in International Relations. *Journal of Positive School Psychology*, 6, 5087-5096.
- Fakhreddin Soltani, J. A. (2014). Constructivism, Christian Reus-Smit and the Moral Purpose of the State. *Asian Social Science*, 155-156.
- Finnemore, M. N. (1998). Security Communities in Theoretical Perspective. In *Security Communities*. Cambridge University Press.
- Gaub, V. F. (2022). Taliban In or Out?: Afghanistan in 2025. *European Union Institute for Security Studies (EUISS)*.
- Gautam, V. G. (2023). Qualitative Research Approaches in Social Sciences. In *Recent Applied Research in Humanities and Social Science*. MKSES Publication.
- Gerring, J. (2007). *Case Study Research: Principles and Practices*. Cambridge University Press.
- Gul, A. (2023, December 1). Retrieved from VoA News:
<https://www.voanews.com/a/afghan-taliban-says-china-becomes-first-nation-to-accept-its-ambassador/7380438.html>.
- Hamid, S. (2021). Americans never understood Afghanistan like the Taliban Did. *Brookings*.
- Islamic Development Bank. (n.d.). Retrieved May 11, 2024, from
<https://www.isdb.org/news/isdb-and-oic-sign-charter-to-establish-the-afghanistan-humanitarian-trust-fund-ahtf>.
- Jemadu, A. (2023). *Analisa Kebijakan Luar Negeri Indonesai sebagai Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Kaltenthaler, K. A. (2022). *The Paradox of the Heavy-Handed Insurgent: Public Support for the Taliban Among Afghan Pashtuns*. SocArXiv. doi:
<https://doi.org/10.31235/osf.io/2fkvt>.
- Katzenstein, P. J. (1996). Introduction: Alternative Perspectives on National security. In *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. Columbia University Press.
- Kompas. (2022, August 25). Retrieved from
<https://www.kompas.tv/internasional/322481/kemlu-tegaskan-indonesia-tetap-tidak-mengakui-pemerintahan-taliban-di-afghanistan>.

- Lantang, F. (2021). Contested Interpretations Of Indonesia's International Leadership In The Foreign Policy Of President Susilo Bambang Yudhoyono And Joko Widodo. *Journal of ASEAN Studies*, 201-202.
- Leira, H. (2019). The Emergence of Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 187.
- Merriam Webster Dictionary. (n.d.). Retrieved from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/policy>.
- Pamungkas, S., Wijayanto, Yandry Kurniawan, Bangkit Wiryawan, Mutti Anggitta, dan Malik Ruslan. (2022). In *Memperkuat Demokrasi di Indonesia* (p. 3). Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) dan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES).
- Paquin, J.-F. M. (2018). *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. Springer Nature.
- Prasetyo, J. H., Direktur Asia Selatan dan Tengah – Kementerian Luar Negeri RI (2024, May 17). Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia dengan Afghanistan dibawah Taliban. (Musa Derek Sairwona, Interviewer).
- Purba, B. A. (2021). Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya terhadap Geopolitik Global. *Jurnal Lembahas RI*, 9, 18-19.
- Rabie, M. (2021). The Rise of Islamic Fundamentalism. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/350189555_The_Rise_of_Islamic_Fundamentalism.
- Rahardjo, P. D. (2017). Studi Kasus dan Penelitian Kualitatif.
- Ridlo, D. U. (2023). *Studi Kasus: Teori dan Praktek*. Publica Indonesia Utama.
- Robaniyah, C. R. (2023). Praktek Politik Islam: Kepemimpinan Taliban di Afghanistan dalam Tinjauan Politik Islam Kawasan.
- Sikkink, M. F. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. In *International Organization*. Cambridge University Press.
- Sukma, R. (1995). The Evolution of Indonesia's Foreign Policy: An Indonesian View. *Asian Survey*, 35, 307-308.
- United Nations. (2023, September 26). Retrieved from <https://press.un.org/en/2023/sc15421.doc.htm>.
- Wendt, A. (1992). *Anarchy is what states make of: the social construction of power politics*. MIT Press.
- Yin, R. K. (2003). *Case Study Research Design and Methods, third edition*. Sage Publication.